

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2021/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF**LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI****UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN****I. DATA PRIBADI**1. Nama : **SUMULE TUMBO**2. Jabatan : **KEPALA PUSAT**3. NHK : **803754****II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **4.100.000.000**1. Tanah Seluas 320 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.0002. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/150 m2 di KAB / KOTA
TORAJA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.0003. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/217 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000.000**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **310.000.000**1. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.0002. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKKAR Tahun 2015,
HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **---****D. SURAT BERHARGA** Rp. **---****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **86.531.229****F. HARTA LAINNYA** Rp. **29.000.000****Sub Total** Rp. **4.525.531.229****III. HUTANG** Rp. **---****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **4.525.531.229**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.